



BUPATI SUMEDANG  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 75 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBERLAKUAN PEMBATAHAN KEGIATAN MASYARAKAT LEVEL 4  
*CORONA VIRUS DISEASE 2019*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2021 telah ditetapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease 2019* yang jangka waktunya sampai dengan tanggal 20 Juli 2021;
- b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia yang menginstruksikan agar melaksanakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 *Corona Virus Disease 2019*, dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 *Corona Virus Disease 2019* di Wilayah Jawa dan Bali, perlu melaksanakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 *Corona Virus Disease 2019*;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 *Corona Virus Disease 2019*;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantina Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
10. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326);

13. Peraturan Gubernur...

13. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanggulangan Covid-19 di Wilayah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 36) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 38 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanggulangan Covid-19 di Wilayah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 38);
14. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 48 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Mikro dalam Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 48);
15. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 60 Tahun 2020 tentang Pengenaan Sanksi terhadap Pelanggaran Tertib Kesehatan dalam Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 60);
16. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 Nomor 40);
17. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengenaan Sanksi Administratif terhadap Pelanggaran Tertib Kesehatan dalam Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT LEVEL 4 *CORONA VIRUS DISEASE* 2019.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Sumedang.
2. Bupati adalah Bupati Sumedang.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
4. *Corona Virus Disease* 2019 yang selanjutnya disebut Covid-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis corona virus yang baru ditemukan, yang merupakan virus baru dan penyakit yang sebelumnya tidak dikenal sebelum terjadi wabah di Wuhan, Tiongkok bulan Desember 2019.

BAB II  
PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT  
LEVEL 4

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 4 Covid-19 yang dilaksanakan mulai tanggal 21 Juli 2021 sampai dengan 25 Juli 2021.

Pasal 3

Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 4 Covid-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diterapkan pada pelaksanaan:

- a. kegiatan belajar mengajar di sekolah, pondok pesantren, perguruan tinggi, akademi, lembaga pendidikan dan pelatihan;
- b. kegiatan pada sektor non esensial;
- c. kegiatan pada sektor esensial;
- d. kegiatan pada sektor pemerintahan yang memberikan pelayanan publik yang tidak bisa ditunda pelaksanaannya;
- e. kegiatan pada sektor kritikal;
- f. supermarket, mini market, pasar rakyat, toko kelontong, dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari;
- g. apotik dan toko obat;
- h. kegiatan makan/minum di tempat umum meliputi warung makan, rumah makan, kafe, pedagang kaki lima dan lapak jajanan;
- i. kegiatan pada pusat perbelanjaan, mal, dan pusat perdagangan;
- j. kegiatan konstruksi;
- k. kegiatan di tempat ibadah;
- l. kegiatan pada fasilitas umum yaitu area publik, taman umum, tempat wisata umum, atau area publik lainnya;
- m. kegiatan dan lokasi seni, budaya, sarana olahraga dan sosial kemasyarakatan;
- n. transportasi umum;
- o. resepsi pernikahan;
- p. pelaku perjalanan domestik; dan
- q. kegiatan rapat, seminar dan pertemuan luring.

Pasal 4

Kegiatan belajar mengajar di sekolah, pondok pesantren, perguruan tinggi, akademi, lembaga pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilaksanakan secara daring (*on line*).

Pasal 5

Kegiatan pada sektor non esensial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b diberlakukan 100% (seratus persen) bekerja dari rumah (*work from home*).

Pasal 6 ...

#### Pasal 6

- (1) Kegiatan pada sektor esensial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c seperti:
  - a. keuangan dan perbankan hanya meliputi asuransi, bank, pegadaian, dana pensiun, dan lembaga pembiayaan yang berorientasi pada pelayanan fisik dengan pelanggan (*customer*);
  - b. pasar modal yang berorientasi pada pelayanan dengan pelanggan (*customer*) dan berjalannya operasional pasar modal secara baik;
  - c. teknologi informasi dan komunikasi meliputi operator seluler, data center, internet, pos, dan media terkait dengan penyebaran informasi kepada masyarakat;
  - d. perhotelan non penanganan karantina Covid-19; dan
  - e. industri orientasi ekspor, dimana pihak perusahaan harus menunjukkan bukti contoh dokumen pemberitahuan ekspor barang (PEB) selama 12 (dua belas) bulan terakhir atau dokumen lain yang menunjukkan rencana ekspor dan wajib memiliki izin operasional dan mobilitas kegiatan industri (IOMKI).
- (2) Kegiatan keuangan dan perbankan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat beroperasi dengan kapasitas paling banyak 50% (lima puluh persen) staf untuk lokasi yang berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat dan 25% (dua puluh lima persen) untuk pelayanan administrasi perkantoran untuk mendukung operasional.
- (3) Kegiatan pasar modal, teknologi informasi dan komunikasi, dan perhotelan non penanganan karantina Covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf d dapat beroperasi dengan kapasitas paling banyak 50% (lima puluh persen) staf.
- (4) Kegiatan industri orientasi ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dapat beroperasi dengan kapasitas paling banyak 50% (lima puluh persen) staf hanya di fasilitas produksi/pabrik dan 10% (sepuluh persen) untuk pelayanan administrasi perkantoran untuk mendukung operasional.

#### Pasal 7

Kegiatan pada sektor pemerintahan yang memberikan pelayanan publik yang tidak bisa ditunda pelaksanaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d diberlakukan pegawai bekerja dari kantor (*work from office*) paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dengan protokol kesehatan secara ketat.

#### Pasal 8

- (1) Kegiatan pada sektor kritikal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e seperti:
  - a. kesehatan;
  - b. keamanan dan ketertiban masyarakat;
  - c. penanganan bencana;
  - d. energi;
  - e. logistik, transportasi, dan distribusi terutama untuk kebutuhan pokok masyarakat;
  - f. makanan dan minuman serta penunjangnya, termasuk untuk ternak/hewan peliharaan;

g. pupuk dan...

- g. pupuk dan petrokimia;
  - h. semen dan bahan bangunan;
  - i. objek vital nasional;
  - j. proyek strategis nasional;
  - k. konstruksi infrastruktur publik; dan
  - l. utilitas dasar meliputi listrik dan air, dan pengelolaan sampah.
- (2) Kegiatan pada sektor kritikal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dapat beroperasi 100% (seratus persen) staf tanpa ada pengecualian.
- (3) Kegiatan pada sektor kritikal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sampai dengan huruf l dapat beroperasi 100% (seratus persen) staf hanya pada fasilitas produksi/konstruksi/pelayanan kepada masyarakat dan untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional diberlakukan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) staf.

#### Pasal 9

Supermarket, mini market, pasar rakyat, toko kelontong, dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f dibatasi kegiatannya dengan ketentuan:

- a. jam operasional sampai dengan pukul 18.00 WIB;
- b. jumlah pengunjung paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari kapasitas; dan
- c. penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat.

#### Pasal 10

Apotik dan toko obat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g dapat buka selama 24 (dua puluh empat) jam.

#### Pasal 11

Kegiatan makan/minum di tempat umum meliputi warung makan, rumah makan, kafe, pedagang kaki lima dan lapak jajanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h, baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mal:

- a. hanya melayani pesan antar dan tidak menerima makan di tempat (*dine-in*); dan
- b. dibatasi jam operasionalnya sampai dengan pukul 20.00 WIB.

#### Pasal 12

Kegiatan pada pusat perbelanjaan, mal, dan pusat perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf i ditutup sementara, kecuali akses untuk restoran, supermarket, dan pasar swalayan dapat diperbolehkan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 9 dan Pasal 11.

#### Pasal 13

Kegiatan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf j, diizinkan beroperasi 100% (seratus persen) untuk infrastruktur publik meliputi tempat konstruksi dan lokasi proyek dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat.

#### Pasal 14

Tempat ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf k meliputi Masjid, Mushola, Gereja, Pura, Vihara, dan Klenteng serta tempat lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah tidak mengadakan kegiatan peribadatan/keagamaan berjamaah selama penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 4 Covid-19 dan mengoptimalkan pelaksanaan ibadah di rumah.

#### Pasal 15

Kegiatan pada fasilitas umum yaitu area publik, taman umum, tempat wisata umum, atau area publik lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf l ditutup sementara.

#### Pasal 16

Kegiatan dan lokasi seni, budaya, sarana olahraga dan sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf m yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan ditutup sementara.

#### Pasal 17

- (1) Transportasi umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf n meliputi kendaraan umum, angkutan masal, taksi konvensional dan *online* serta kendaraan sewa/rental.
- (2) Transportasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pembatasan jumlah penumpang paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari kapasitas dan jam operasional sampai dengan pukul 18.00 WIB.

#### Pasal 18

Pelaksanaan resepsi pernikahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf o ditiadakan selama penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 4 Covid-19.

#### Pasal 19

- (1) Pelaku perjalanan domestik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf p yang menggunakan mobil pribadi, sepeda motor dan transportasi umum jarak jauh harus menunjukkan:
  - a. kartu vaksin minimal vaksinasi dosis pertama; dan
  - b. Antigen (H-1) untuk kedatangan dan keberangkatan dari dan ke luar wilayah aglomerasi.
- (2) Ketentuan kepemilikan kartu vaksin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk sopir kendaraan logistik dan transportasi barang lainnya.

#### Pasal 20

Kegiatan rapat, seminar dan pertemuan luring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf q ditutup sementara.

#### Pasal 21

Selama pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 4 Covid-19, rukun tetangga dengan kriteria zona merah tetap melaksanakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat mikro.

### BAB III PENCEGAHAN, PENGENDALIAN, DAN PENGAWASAN

#### Pasal 22

Pemerintah Daerah Kabupaten melakukan pencegahan terjadinya peningkatan penularan Covid-19 melalui:

- a. sosialisasi terkait dengan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 4 Covid-19;
- b. mengintensifkan penegakan 5M yaitu:
  1. menggunakan masker;
  2. mencuci tangan;
  3. menjaga jarak;
  4. menghindari kerumunan; dan
  5. mengurangi mobilitas;
- c. penguatan terhadap 3T yaitu:
  1. *testing*;
  2. *tracing*; dan
  3. *treatment* yaitu menyiapkan dan memantau ketersediaan tempat isolasi dan karantina;
- d. pengoptimalan pusat kesehatan masyarakat dalam penanganan Covid-19 khususnya dalam pencegahan, *testing* dan *tracing*; dan
- e. pengantisipasi potensi kerumunan yang mungkin terjadi selama pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 4 Covid-19.

#### Pasal 23

Untuk mencegah penyebaran dan penularan Covid-19, Satuan Tugas Penanganan Covid-19 tingkat kabupaten, Satuan Tugas Penanganan Covid-19 tingkat Kecamatan dan Posko tingkat Desa/kelurahan sesuai dengan kewenangannya dapat membatasi pergerakan setiap orang, melalui penutupan sementara dan/atau pembatasan penggunaan ruas jalan tertentu di Daerah Kabupaten.

#### Pasal 24

Dinas Perhubungan dan Satuan Polisi Pamong Praja melakukan penguatan, pengendalian dan pengawasan terhadap perjalanan orang pada pos komando *check point* bersama dengan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

### BAB IV SANKSI ADMINISTRATIF

#### Pasal 25

Setiap orang yang melanggar ketentuan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 4 Covid-19 diberikan sanksi administratif sesuai ketentuan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengenaan Sanksi Administratif terhadap Pelanggaran Tertib Kesehatan dalam Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 atau peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang  
pada tanggal 21 Juli 2021

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang  
pada tanggal 21 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

HERMAN SURYATMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2021 NOMOR 75